



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA
DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai Dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Hari Lahir Pancasila Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mangingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Hari Lahir Pancasila Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk tim sekretariat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 85 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
HARI LAHIR PANCASILA DI PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

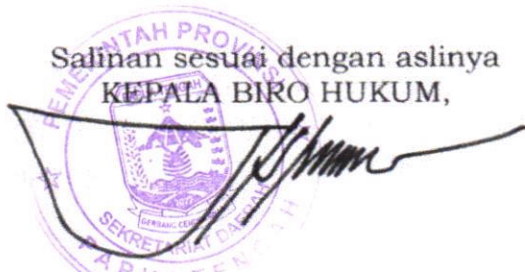
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Gubernur Papua Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Penanggung Jawab
3.	Komandan Kodim 1705 Nabire	Penasehat
4.	Kepala Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah	Ketua Pelaksana
A.	BIDANG UPACARA	
1.	Bernard Sitorus, ST (Kepala Biro Umum)	Koordinator
2.	Maikel Meki Gobay, SE (Plt. Kasubag Program dan Keuangan Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah)	Anggota
3.	Rio Aminudin, S.IP (Pelaksana pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah)	Anggota
4.	Mikhaela Leonarda Lea Ena, S.STP (Plt. Kasubag Urusan Dalam Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah)	Anggota
5.	Muhammad Ilham Ardiansari, S.Tr.IP (Pelaksana Sub Bagian Protokoler Setda Provinsi Papua Tengah)	Anggota
6.	Junior R. Panjaitan, S.Tr.IP (Pelaksana Sub Bagian Protokoler Setda Provinsi Papua Tengah)	Anggota
7.	Ahmad Rato (PPI)	Anggota
B.	BIDANG PERLENGKAPAN	
1.	Kapten Yusup Rummy (Kodim 1705 Nabire)	Koordinator
2.	Sertu Alim (Kodim 1705 Nabire)	Anggota
3.	Serka M. Naser (Kodim 1705 Nabire)	Anggota
4.	Yohannes Ayer, S.IP., M.Si. (Pelaksana Pada Bagian Umum Setda Provinsi Papua Tengah)	Anggota
5.	Yosep Degei, S.STP (Pelaksana Pada Bagian Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah)	
C.	BIDANG KESEHATAN	
1.	Frans F. C. Sayori Kepala RSUD Nabire	Koordinator
2.	Elia Datuan Ranteallo (RSUD)	Anggota
3.	Elis Toba (RSUD)	Anggota
4.	Satriani (RSUD)	Anggota
5.	Dewinta Paongan (RSUD)	Anggota
6.	Septinus Woniana (RSUD)	Anggota

D	BIDANG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	
1.	Alanthino Wiay, S.STP (Kabag Administrasi Pimpinan Pada Setda Provinsi Papua Tengah)	Koordinator
2.	Zulfahmi Tajuddin (PPI)	Anggota
3.	Zaenal Rumfod (Pelaksana Sub Bagian Humas Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah)	Anggota
4	Irwan Irwan Busra (Pelaksana Sub Bagian Humas Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah)	Anggota
E	KEAMANAN	
1.	Victor Fun, S.Sos., M.Si. (Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah)	Koordinator
2.	Kapten Cba. M. Taufik (Kodim 1705 Nabire)	Anggota
3.	Serka Hasyim (Kodim 1705 Nabire)	Anggota
4.	Otis Money, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah)	Anggota
5.	Demas F. Sinaga, S.IP (Pelaksana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah)	Anggota
F	BIDANG KESEKRETARIATAN	
1.	Yohannes Mom, S.Th (Plt. Kabid Wawasan Kebangsaan pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah)	Ketua
2.	Yohanis A. Gaspersz (Pelaksana pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah)	Anggota
3.	Daud Pongtuluran (Pelaksana pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah)	Anggota
4.	Alfrida Somba (Pelaksana pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah)	Anggota
5.	Amawi Mose Arena Bonai, S.Tr.IP (Pelaksana pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah)	Anggota
6.	Octavianus Wanena, SE (Pelaksana pada Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah)	Anggota
7.	Muhammad Ardi Yansyah (PPI)	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002